



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Subjek dan Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Mongabay**

Mongabay merupakan media alternatif yang berdiri sejak April 2012. Mongabay memiliki fokus pemberitaan pada isu lingkungan, lebih tepatnya hutan. Namun mongabay juga tetap menyediakan berita, analisis, dan informasi lain yang berhubungan dengan lingkungan. Mongabay di Indonesia merupakan media yang diadaptasi dari Mongabay di United States of America (USA). Mongabay juga memanfaatkan teknologi dalam penyebaran informasi, tidak hanya melalui website [Mongabay.co.id](http://Mongabay.co.id), tapi juga melalui media sosial seperti Twitter, Facebook dan YouTube (About, 2019).

Mongabay pertama kali dicetuskan oleh Rhett A. Butler pada tahun 1999. Semua berawal sejak 25 tahun yang lalu, disaat Butler mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke hutan hujan di Malaysia, dan melihat berbagai macam flora dan fauna. Hal ini membuat Butler jatuh cinta pada hutan, hingga saat kembali ke California, ia tetap mencari informasi tentang isu lingkungan dan hutan (Butler, 2019).

Sebagai orang yang memiliki hasrat dalam menjaga hutan, hati Butler hancur ketika mengetahui beberapa hutan di Kalimantan terbakar. Ia memutuskan untuk meningkatkan kepedulian lingkungan dan hutan dengan menulis buku tentang hal-hal yang terjadi pada hutan (Butler, 2019).

Diumurnya yang ke 26 Butler mulai serius dan fokus dalam menjalankan Mongabay. Tanpa membutuhkan waktu yang cukup banyak, tulisan Butler cukup memberikan dampak yang besar, dan berhasil dicetak dalam hampir 40 bahasa. Alasan Butler dalam memulai pemberitaan lingkungan karena, isu lingkungan kurang mendapatkan perhatian dari media *mainstream* (Butler, 2019).

Mongabay melihat bahwa penggundulan hutan, kebakaran hutan, kurangnya pengawasan, dan kurangnya pengetahuan merupakan hal yang mengancam keanekaragaman hayati yang berada di hutan. Keacuhan masyarakat juga menjadi tujuan dari Mongabay untuk dapat membukakan mata masyarakat bahwa hutan yang ada di lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja (Butler, 2019).

Butler memiliki fokus untuk meng-*cover* wilayah geografi yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, namun memiliki tingkat ancaman yang tinggi juga. Sehingga menjadikan hutan hujan tropis sebagai prioritas utama Mongabay (Butler, 2019).

#### **4.1.1.1 Pemberitaan pada Mongabay yang berjudul ‘*Kebakaran Hutan dan Lahan Itu Musuh Bersama, harus Dicegah!*’**

News

Oleh Taufik Wijaya

Kebakaran Hutan dan Lahan Itu Musuh Bersama, harus Dicegah!

Tahun 2018, Sumatera Selatan sukses menggelar Asian Games tanpa diganggu kebakaran hutan dan lahan. Pada 2019 ini, mampukah Sumatera Selatan menjaga pesta politik tanpa bencana kekeringan dan kebakaran? Terlebih, sejumlah wilayah gambut di Sumatera ada yang telah terbakar.

Dr. Najib Asmani, Koordinator Tim Restorasi Gambut (TRG) Sumatera Selatan, Minggu (13/1/2019) mengatakan, semangat pencegahan atau pemadaman kebakaran hutan dan lahan harusnya bukan hanya untuk mengamankan suatu *event* atau takut dikecam dunia internasional. Tetapi, karena suatu kebutuhan untuk pelestarian lingkungan bebas emisi. Kesadaran untuk menjaga Bumi lestari, sehingga dapat menghidupi semua makhluk hidup di masa mendatang.

“Oleh karena itu, penting dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang biasa membuka lahan, reforma agraria pada lahan yang terbengkalai dan berkonflik, penegakkan hukum bagi pembakar lahan, serta membangun klaster kegiatan *green industry*. Ini dilakukan bertahap dan berkelanjutan hingga semuanya tercapai sempurna,” jelasnya.

Klaster kegiatan *green industry* ini, misalnya mendorong hadirnya kelompok industri yang efektif dan efisien terhadap sumber daya alam. Kemudian mendorong penggunaan energi bersih terbarukan atau tidak lagi menggunakan energi fosil. “Industri ini menciptakan produk yang hemat bahan baku dan mudah diperbarui. Teknologi yang digunakan juga tidak boros energi,” jelasnya.

### **Musuh bersama**

Kol. Inf. Iman Budiman, Danrem 044 Garuda Dempo dalam sebuah tulisannya di harian [Sriwijaya Post](#), menjelaskan enam langkah mencegah kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Yang *pertama*, jadikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai musuh bersama.

“Sangat penting mengkampanyekan dan menjadikan opini bersama bahwa karhutla dan kabut asap adalah derita kita bersama. Karhutla bukan hanya dirasakan masyarakat setempat, tidak hanya di titik terjadinya api, tapi juga daerah lain yang mungkin tidak tahu apa-apa. Efek karhutla tak pandang strata dan status, mau pejabat, rakyat biasa, tentara, polisi, siapa pun akan terkena. Karhutla adalah musuh bersama,” tulisnya.

*Kedua*, memberikan solusi kepada masyarakat terutama dalam pengolahan lahan pertanian. Memperbanyak cadangan tampungan air atau melakukan rekayasa teknologi, harus dilakukan dari sekarang.

*Ketiga*, membangun pola pikir bersama bahwa karhutla bukan rutinitas tahunan yang harus ditunggu. Arahkanlah sebagian besar program pembangunan untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang berefek pencegahan perilaku membakar.

*Keempat*, peran serta perusahaan dan kalangan swasta di berbagai lokasi harus diperkuat dan dikawal. Pengawasan maksudnya, kegiatan mereka yang bersinggungan dengan gambut harus memiliki jaminan aman kebakaran dan tidak menjadi penyebab kebakaran di tempat lain.

*Kelima*, sudah cukup banyak pihak yang terlibat dalam mengatasi karhutla, baik unsur pemerintah, masyarakat, LSM, dan bahkan pihak luar negeri. Sangat penting kesamaan gerak dan koordinasi maksimal dilakukan.

*Keenam*, perlu dukungan pemetaan yang jelas dan terukur terhadap semua lahan yang rentan terbakar dan masyarakat terdampak, baik secara fisik, kesehatan, maupun ekonomi. Terpenting adalah komitmen semua pihak untuk tidak membiarkan lahannya terlantar menjadi santapan api.

Dr. Yenrizal Tarmizi, pakar komunikasi lingkungan dari UIN Raden Fatah Palembang, sepaham dengan pandangan Najib Asmani dan Imam Budiman. “Karhutla jangan dipandang sebagai persoalan sesaat. Ini sudah menjadi persoalan utama bangsa dalam pengelolaan lahan dan hutan. Jadi benar, mengatasi persoalannya bukan karena takut dikecam dunia internasional, tapi karena sebuah kesadaran. Kesadaran menjadikan karhutla musuh bersama,” katanya, Minggu (13/1/2019).

“Sebagai musuh bersama, pemerintah kota dan kabupaten harus bertanggung jawab terhadap persoalan ini. Termasuk pula mendorong seoptimalnya tanggung jawab pelaku usaha. Jangan hanya dibebankan kepada masyarakat yang sebenarnya menjadi korban dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang sejak lama sudah salah,” tandasnya.

<https://www.mongabay.co.id/2019/01/14/kebakaran-hutan-dan-lahan-itu-musuh-bersama-harus-dicegah/>

Pemberitaan tentang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2019 pertama kali ditulis pada 14 Januari, dengan judul ‘Kebakaran Hutan dan Lahan Itu Musuh Bersama, Harus dicegah!’.

Artikel ini ditulis oleh Taufik Wijaya, dengan pesan informasi yang

memiliki keselarasan dengan visi dan misi yang dicetuskan oleh Ridzki R. Sigit selaku Program Manager dari Mongabay.co.id, yaitu fungsi persuasif dalam bentuk pencegahan.

Taufik menuliskan kalimat persuasif yang menjelaskan enam langkah dalam mencegah kebakaran yaitu, menjadikan kebakaran hutan dan lahan sebagai musuh pertama, kedua memberi solusi kepada masyarakat terutama dalam pengolahan lahan pertanian, ketiga membangun pola pikir bersama bahwa karhutla bukan rutinitas tahunan, keempat peran serta perusahaan dan kalangan swasta di berbagai lokasi harus diperkuat dan dikawal, kelima sudah cukup banyak pihak yang terlibat dalam mengatasi karhutla, baik unsur pemerintah, masyarakat, LSM, bahkan pihak luar negeri, keenam perlu dukungan pemetaan yang jelas dan terukur terhadap semua lahan yang rentan terbakar dan masyarakat terdampak, baik secara fisik, kesehatan, ataupun ekonomi.

#### 4.1.1.2 Pemberitaan pada Mongabay yang berjudul ‘*Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Terjadi, Bagaimana Solusinya?*’

News

Oleh Falahi Mubarak, 16 Nov 2019

Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Terjadi, Bagaimana Solusinya?

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau 2019 diberbagai wilayah di Indonesia terus terjadi. Efek dari kebakaran cukup banyak dan luas, juga memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, warisan dan struktur sosial daerah pedesaan, dan juga kota terdekat maupun negara tetangga.

Menurut [Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan \(KLHK\)](#), berdasarkan citra satelit landsat sampai pada bulan September 2019 ini kebakaran hutan dan lahan mencapai 857.755 hektare. Untuk lahan mineral 630.451 hektare, dan lahan gambut 227.304 hektare.

Raffles B. Pandjaitan, Plt Direktur Pengendali Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Selasa (22/10/2019) menjelaskan, total luasan itu terdiri 66.000 hektare di Hutan Tanaman Industri (HTI), 18.465 hektare hutan alam, 7.545 hektare Restorasi Ekosistem (RE), dan 7.312 hektare di areal pelepasan kawasan hutan. Terbanyak di wilayah yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN yang sudah bersertifikat, seluas 110.476 hektare.

Sementara di Jawa Timur pada rentang bulan Juli dan Agustus, [Walhi Jatim](#) mencatat ada beberapa titik kawasan hutan di Jatim yang mengalami kebakaran cukup luas. Meliputi hutan di teritori Kabupaten Tuban, Bondowoso, Situbondo, Madiun, Nganjuk, Malang dan Batu. Beberapa kawasan hutan yang terbakar itu menurut Walhi Jatim keluasannya cukup masif, yaitu wilayah gunung Panderman, gunung Arjuno dan gunung Welirang. Ketiga gunung ini masuk di kawasan Malang Raya yaitu Batu, Malang, sebagian Mojokerto dan Pasuruan.

Adapun, total luasan hutan yang terbakar di gunung Panderman 2.452 hektare, kemudian gunung Arjuno sekitar hampir 3.000 hektare.

Walhi Jatim menilai, kebakaran hutan di provinsi terluas di Pulau Jawa ini cukup stabil, tidak ada penurunan yang cukup signifikan dari tahun

ke tahun, kecuali pada tahun 2016 yang tidak ada kebakaran di beberapa kawasan hutan ini. Di tahun 2014 Walhi Jatim mencatat, kawasan hutan yang terbakar ada sekitar 4.995 hektare, kemudian di tahun 2015 meningkat menjadi 7.996 hektare, pada tahun 2016 dinilai tidak ada kebakaran di kawasan hutan.

Di tahun selanjutnya, 2017 mereka mencatat ada 5.116 hektare hutan yang terbakar. Angka itu dikatakan naik kembali di tahun 2018, dengan keluasan area hutan yang terbakar sekitar 7.279 hektare. Di tahun ini, menurut Walhi Jatim ada beberapa kawasan lindung yang terbakar, yakni kawasan Taman Nasional Baluran di Situbondo dan beberapa kawasan hutan di Probolinggo dan Pasuruan.

### **Lebih Murah**

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Salah satunya yaitu pembukaan lahan yang dilakukan masyarakat petani. Selain itu, kebakaran hutan juga bisa terjadi karena olah oknum korporasi. Hingga 16 September 2019 polisi sudah menetapkan 185 tersangka perseorangan dan empat korporasi dalam kasus karhutla yang terjadi di Riau, Kalbar dan Kalteng. KLHK mengklaim, telah menyegel sebanyak 42 perusahaan yang diduga menjadi otak di balik pembakaran hutan dan lahan.

Selain di Kalimantan dan Sumatra, praktik pembakaran hutan dan lahan juga terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Lamongan, Jatim. Di Kabupaten berjuduk tahu campur ini masih banyak petani yang membersihkan lahan dengan cara membakar, baik itu di lahan pribadi maupun lahan milik Perhutani.

Sujarwo salah satunya, pria kelahiran 1935 ini mengaku membersihkan lahan dengan cara membakar itu lebih mudah dan praktis. “Sebelum memasuki hujan lahan dibakar dulu, nanti kalau sudah datang musim hujan baru ditanami jagung,” ujar pria 4 anak ini saat ditemui Mongabay di lahan garapannya di Desa Gampang Sejati, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jatim, Selasa (29/10/2019).

Hal sama juga dikatakan Suhanis (52), perempuan ini mengaku lahanya bisa lebih bersih setelah dibakar, selain itu juga tidak terlalu memakan banyak biaya dibandingkan sewa jasa orang. “Kalau memakai jasa orang paling tidak harus mempersiapkan biaya kurang lebih Rp5 juta,” kata petani penggarap lahan Perhutani ini.

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengemukakan, dari 328.724 hektare luas karhutla di tahun 2019 ini 99% terjadi karena ulah manusia.



## **Solusi**

Saat di konfirmasi, Acep Akbar, peneliti utama Bidang Kebakaran Hutan dan Silvikultur dari Balai Peneliti dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Banjarbaru, menjelaskan ada banyak faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan.

Dia menilai untuk penyebab kebakaran hutan ini sudah umum. Termasuk masyarakat perorangan, seperti warga sekitar hutan yang membuka lahan untuk berladang. Perusahaan yang tidak berizin usaha ketika membuka lahan untuk ditanami kelapa sawit. Ada juga pembakaran arsonis (yang direncanakan), atau bermotif kriminal.

“Kebakaran juga bisa terjadi saat orang membuka akses untuk memanfaatkan sumber daya alam di dalam hutan. Bisa ikan, hutan, bisa hasil hutan, kayu atau lebah madu,” jelas Acep yang dihubungi Mongabay Indonesia, Selasa (05/11/2019).

Menurut dia, untuk saat ini isu yang sedang ramai yaitu kebakaran hutan di lahan gambut. Karena kebakaran di lahan mineral itu dirasa tidak menghasilkan asap tebal, pada umumnya bahan bakarnya kering, dan kadar airnya rendah. Sehingga pembakarannya dinilai sempurna, tidak menghasilkan koloid asap. Karena itu, untuk saat ini yang menjadi perhatian oleh banyak kalangan itu justru lebih kepada lahan gambut.

Profesor riset bidang kebakaran hutan dan silvikultur ini melanjutkan, untuk solusinya harus ada pembinaan ke para pengguna api. Karena menurutnya, pada dasarnya manusia hanya bisa melakukan pencegahan dan pemadaman sejak dini.

Jika sudah terlanjur luas, itu sudah dianggap sebagai bencana anthropogenic disasters yang dibuat oleh manusia. “Atau strategi seperti apa yang saya sebut dengan pengelolaan atau pencegahan kebakaran berbasis masyarakat sekitar hutan,” katanya.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat sekitar hutan sangat dibutuhkan. Seperti pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Masyarakat Peduli Api. Selain itu, juga harus ada pelatihan, fasilitas, biaya operasional secara intensif. “Saya mengusulkan, kalau misalkan dana desa dianggarkan untuk itu kan sebenarnya lebih praktis dan juga efektif,” kata pria penulis buku ‘Pemahaman dan Solusi Masalah Kebakaran Hutan di Indonesia’ itu.

Lanjutnya, di masyarakat tertentu kearifan lokal dalam mencegah kebakaran hutan itu sebenarnya sudah terbentuk. Beberapa desa seperti Kalimantan Selatan, Desa Mawangi, Suku Banjar. Kemudian di Desa

Loksado, Suku Dayak, di sekitar kampung mereka tidak ada kebakaran hutan. “Mereka tertib sekali, tetap membakar tetapi terkendali. Lahannya dikeringkan dulu sehingga tidak menghasilkan asap, kemudian disekat, dan mereka bergiliran, tidak serentak,” ujarnya.

Untuk solusi berikutnya yaitu pembuatan teknologi yang sifatnya bisa dipakai untuk lahan organik sisa-sisa kebakaran seperti tunggak kayu. Teknologi itu harus bisa digunakan untuk membuat bahan yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. “Kalau misalkan itu bisa dimanfaatkan, saya yakin pembakaran yang biasa dilakukan akan berkurang, tapi sekali lagi itu juga harus didukung dengan sistem pemasaran, lebih-lebih bisa sampai ekspor,” pungkasnya..

<https://www.mongabay.co.id/2019/11/16/kebakaran-hutan-dan-lahan-terus-terjadi-bagaimana-solusinya/>

Pemberitaan tentang kebakaran hutan pada Mongabay, berjudul ‘Kebakaran Hutan dan Lahan Terus Terjadi, Bagaimana Solusinya?’. Artikel ini ditulis oleh Falahi Mubarak pada 16 November 2019. Artikel ini menuangkan fungsi dari Mongabay sebagai media yang mengedepankan pencegahan dan kritik. Pencegahan yang dilakukan berupa paragraf yang memaparkan solusi. Fungsi kritik dijalankan dengan sedikit sindiran yang mengatakan bahwa pembukaan lahan dengan cara dibakar lebih menguntungkan secara finansial, yang berarti bahwa masyarakat masih memiliki sifat apatis terhadap lingkungan.

Tidak hanya menyediakan informasi mengenai lahan yang terbakar, pada artikel ini Falahi juga menjelaskan beberapa faktor terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah pembukaan lahan oleh oknum korporasi yang tergiur dengan murahnya harga pembukaan lahan. Artikel ini menerangkan hingga 16

September 2019, polisi sudah menetapkan 185 tersangka perseorangan, dan empat korporasi dalam kasus karhutla yang terjadi di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Setelah menjelaskan faktor-faktor, artikel ini juga memuat edukasi berupa solusi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Falahi menjelaskan bahwa solusinya perlu ada pembinaan kepada para pengguna api, tentang bahayanya lahan gambut. Sebab jika lahan gambut sudah terbakar luas, maka hal ini sudah dianggap sebagai bencana *anthropogenic disasters*.

#### **4.1.1.3 Pemberitaan pada Mongabay yang berjudul ‘Kala Satwa**

##### ***Menderita Karena Kebakaran Hutan dan Lahan’***

Feature Flora dan Fauna

Oleh Yitno Suprpto 6 November 2019

Kala Satwa Menderita Karena Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan di Jambi, tak hanya berdampak pada kehancuran lingkungan, kesehatan masyarakat juga kerusakan habitat satwa sekaligus satwanya.

Analisis Warsi, 68% lahan terbakar di Jambi, merupakan gambut, atau sekitar 86.000-an hektar. Kebakaran terluas pada kawasan berizin. Dalam hitungan KKI Wars, konsesi HPH terluas, 32.000 hektar, 41 perusahaan sawit juga turut menyumbang lahan terbakar seluas 20,983 hektar.

Disusul 19 perusahaan pemegang izin hutan tanaman industri luas 16.456 hektar. Tanaman Hutan Raya 10.155 hektar, lahan masyarakat 2.956 hektar, hutan produksi terbatas 5.165 hektar dan hutan produksi konversi 169 hektar.

Celakanya, hutan lindung, taman nasional, dan kawasan restorasi habitat satwa di Jambi, juga turut terbakar. Warsi mencatat, luas kebakaran di kawasan hutan mencapai 13.563 hektar, restorasi ekosistem 13.140 hektar dan taman nasional 10.811 hektar.

Sampai akhir Agustus, PT Restorasi Ekosistem mencatat, ada 313 titik api (*hotspot*) di Hutan Harapan yang jadi wilayah restorasi.

Mangarah Silalahi, Presiden Direktur Reki, menyebut, lebih 5.000-6.000 hektar izin Reki terbakar pada 2019. Kawasan perambahan, katanya, jadi lokasi kebakaran paling parah.

Dia bilang, banyak pembukaan lahan ilegal di kawasan izin dengan cara membakar. Terbukti, anggota Polres Batanghari menangkap 27 orang diduga sengaja membakar untuk pembukaan lahan di Hutan Harapan, 21 orang sebagai tersangka.

Mangarah mengatakan, kebakaran di Hutan Harapan bukan hanya menghancurkan ekosistem, juga memusnahkan satwa yang hidup di dalamnya, terutama kelompok reptil.

“Ular, kadal dan sejenisnya tak bisa kencang berlari,” katanya lewat sambungan telepon.

Hutan Harapan, merupakan bagian dari hutan alam dataran rendah di Jambi, yang menyimpan banyak ragam hayati. Hutan Harapan adalah rumah untuk 71 jenis reptil atau 29% spesies reptile di Sumatera, 55 jenis amfibi, 123 air tawar, 728 tanaman, 307 burung dan sembilan spesies terancam.

Di sana, juga hidup 64 mamalia Sumatera, termasuk delapan gajah Asia dan 29 harimau Sumatera. Ada sekitar 100 jenis satwa dilindungi hidup di Hutan Harapan.

Dia menyakini, kebakaran terjadi membuat habitat gajah dan harimau berkurang, meski hingga kini belum bisa memastikan ada dampak lebih serius.

Kebakaran membuat banyak lebah madu meninggalkan sarang, tak menutup kemungkinan sebagian mereka mati terpanggang. Sedikitnya, 150 batang pohon di Hutan Harapan jadi rumah lebah madu. “Beberapa sudah ditinggalkan, lebah itu kena asap saja lari, apalagi kebakaran.”

Izin restorasi PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT), seluas 38.665 hektar di Tebo juga tak luput dari kebakaran. Kondisi di Blok II paling buruk. Lebih 100 hektar di Desa Pelayungan, Kecamatan Sumai, terbakar.

Dodi Direktur ABT menyebut, banyak titik api terpantau di wilayah yang dibuka jadi kebun warga, hanya 30% hutan tersisa di Blok II.

Tebo, merupakan habitat gajah terbesar di Jambi. Ada 120 gajah dari lima kelompok di sana. Blok II ABT, adalah wilayah jelajah gajah.

“Kalau pergerakan gajah sekarang ke Tebo Multi Agro dan sebagian PT LAJ,” kata Dodi.

Albert dari Frankfurt Zoological Society di Jambi, bilang kebakaran di Tebo, membuat lima kawanan gajah [antara lain, Mutiara, Ginting, Indah dan Cinta] bergerak keluar konsesi ABT menuju alokasi penggunaan lain (APL) di pinggir Desa Semambu, dan Muara Sekalo, yang banyak dibuka jadi perkebunan warga.

Kelompok Freda, katanya, masih bertahan dalam kawasan. Albert khawatir, banyak gajah yang mendekati perkebunan warga memicu konflik gajah dengan manusia. Desa Semambu dan Desa Sekalo, merupakan wilayah jelajah gajah di Tebo.

BKSDA Jambi mencatat, ada 300.000 hektar Tebo, jadi habitat gajah, namun 10 tahun terakhir menyusut jadi 189.000 hektar, tahun ini tinggal 143.000 hektar, itupun tak semua bisa jadi habitat gajah.

Rahmad, Kepala BKSDA Jambi, hanya 60.000 bisa buat habitat gajah di Tebo. Sekitar 80.000 hektar dikuasai perusahaan untuk izin hutan tanaman industri (HTI).

Dia merencanakan, membuat kawasan ekosistem esensial (KEE) di Desa Semambo, Muara Kilis, Suo-Suo, Sekalo dan Pelayungan untuk menyelamatkan habitat gajah, termasuk dari kebakaran. “Tahun depan akan dimulai.”

Rahmad bilang, karhutla tahun ini banyak membunuh satwa. Mereka mati terpanggang. “Kalau kebakaran itu tak ada ampun, habis semua. Apalagi di daerah gambut itu akan sulit sekali menghindar. Kalau harimau itu karena lincahnya masih bisa menghindar.”

Dia menunjukkan beberapa pesan *WhatsApp* laporan temuan jejak harimau Sumatera keluar dari Taman Nasional Berbak Sembilang karena karhutla.

Setiap tahun, habitat hewan di Jambi, terus menyempit karena ulah manusia. Potensi konflik manusia dengan satwa kian terbuka. “Ini bom waktu, tinggal menunggu saja.”

Yoan Dinata, Dewan Pengawas Forum Harimau Kita menyebut, panas dan asap akibat kebakaran di TNBS praktis mengganggu harimau. Namun, katanya, belum ada kabar harimau mati karena karhutla.

Berdasarkan catatan BKSDA Jambi, populasi harimau ada 150 tersebar di Hutan Harapan, Bukit Tigapuluh, Taman Nasional Bukit Duabelas, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan Taman Nasional Berbak Sembilang.

Sunarto, *Wildlife Poaching & Trade Manager*, WWF Indonesia mengatakan, kebakaran tahun ini berdampak pada kawanan gajah dan harimau Sumatera di Tesso Nilo, Lanskap Bukit Tigapuluh, dan Lanskap Bukit Barisan Selatan. Pasca kebakaran ketersediaan makan jauh berkurang.

Dia menyimpulkan, dampak kebakaran hutan 2019, lebih serius pada tingkat species, terutama satwa terancam punah yang hidup bergantung hutan.

### **Ikan air tawar juga terdampak**

Tedjo Sukmono, peneliti ikan air tawar di Jambi, mengatakan, sungai-sungai di sekitar gambut paling terdampak karhutla. Abu karhutla yang masuk ke perairan memicu kekeruhan air naik. Kebakaran, katanya, juga membuat suhu air naik.

“Kalau ia [sungai] kebakaran di sekitarnya, suhu di perairan itu *kan* naik, kalau suhu naik, oksigen jadi rendah. Kalau oksigen rendah, ikan tidak akan hidup baik,” katanya.

Dia bilang, umumnya ikan hanya mampu bertahan hidup dengan oksigen dikisaran 4-6 part per milion. “Kalau di bawah empat tak sanggup hidup atau terganggu. Kecuali, beberapa jenis ikan yang bisa mengambil oksigen langsung ke udara seperti gabus, sepat.”

Kebakaran hutan dan lahan di Muarojambi, diperkirakan berdampak pada habitat ikan di Danau Arang-Arang dan perairan di Desa Seponjen, yang berdekatan dengan lokasi kebakaran.

Kurun waktu 1999-2006, peneliti ikan dunia, Maurice Kottelat dari Raffles Museum of Biodiversity Research, Singapura, yang meneliti bersama Britz, Tan dan White menemukan *Paedocypris progenetica* atau ikan terkecil di dunia di sekitar rawa dan sungai gambut di Desa Arang-Arang, Kumpeh Ilir.

Tedjo bilang, sungai sekitar Desa Suo-Suo di Tebo, juga diperkirakan habitat arwana silver Jambi. Sungai-sungai kecil di kawasan restorasi ABT dan sungai Hutan Harapan juga habitat ikan air tawar Jambi.

“Perlu penelitian untuk membuktikan seberapa parah dampak karhutla pada habitat ikan.”

### **Satwa di Taman Rimba terdampak**

Satwa di Taman Rimba Zoo Jambi juga terdampak asap karhutla di Jambi. Kepala UPTD Taman Rimba, Endang Purnamawati mengatakan, kelompok primata lebih rentan kena dampak kabut asap. Banyak primata di taman rimba terserang batuk.

“Primata ini mirip manusia, jadi lebih rentan.”

Untuk menghindari dampak kabut asap lebih parah, pengelola Taman Rimba harus memberikan vitamin lebih rutin dari biasa.

“Kalau beruang dikasih madu. Kita lebih fokus pada pencegahan pengalaman dari 2015. Kalau burung-burung dikasih vitamin di minumannya. Karena sakit tidak terdeteksi, tiba-tiba mati.”

Dampak kabut asap juga membuat pengunjung Taman Rimba anjlok. Sejak September, pengunjung menurun. Pada masa normal, pengunjung bisa 4.000 orang di akhir pekan. Dua bulan terakhir, pengunjung turun lebih separuh.

<https://www.mongabay.co.id/2019/11/06/kala-satwa-menderita-karena-kebakaran-hutan-dan-lahan/>

Artikel yang memiliki judul ‘Kala Satwa Menderita Karena Kebakaran Hutan dan Lahan’, yang ditulis oleh Yitno Suprpto ini, membahas tentang bagaimana nasib dari hewan-hewan yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan. Seperti yang dikatakan oleh Ridzki sebagai Program Manager, pemberitaan dari Mongabay.co.id harus lengkap. Yang dimaksud dengan lengkap pada artikel ini adalah

dengan adanya penyebab dari kebakaran hutan. Tidak hanya penyebab, namun juga dampak dari kebakaran hutan kepada hewan juga ikut dipaparkan dengan lengkap dalam artikel ini.

Yitno menjelaskan bahwa 68% atau sekitar 86.000 hektar lahan yang terbakar di Jambi merupakan lahan gambut, hal ini memiliki arti bahwa pentingnya edukasi di daerah Jambi, mengenai lahan gambut. Ironisnya hutan lindung, taman nasional, dan kawasan restorasi habitat satwa di Jambi, juga turut terbakar.

Pembakaran secara ilegal ini, tidak hanya merugikan secara ekonomi, namun juga menghancurkan ekosistem, bahkan memusnahkan satwa yang hidup di dalamnya, terutama reptil karena tidak dapat melarikan diri dengan cepat.

Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Hutan Harapan merupakan hutan alam yang menyimpan banyak ragam hayati. Sebanyak 71 jenis reptil, 55 jenis amfibi, 123 air tawar, 728 tanaman, 307 burung, dan sembilan spesies terancam. Selain itu populasi hewan endemik asli Sumatera seperti gajah dan harimau pun juga berkurang akibat kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dikhawatirkan karena gajah dan harimau bisa saja melarikan diri ke pemukiman warga, dan dapat menciptakan konflik diantara manusia dan hewan.

Selain ekosistem hewan darat, ekosistem hewan air tawar juga ikut terganggu. Artikel ini mengatakan bahwa sungai-sungai di sekitar lahan gambut ikut tercemar akibat abu dari karhutla yang memicu



tingkat kekeruhan air naik. Hal ini menjadikan kadar oksigen menjadi rendah, dan menyebabkan kematian pada ikan air tawar, salah satunya ikan serandang, ikan air tawar di Jambi yang terancam punah.

#### **4.1.1.4 Pemberitaan pada Mongabay yang berjudul ‘Aksi Desak Tangani Kebakaran Hutan dan Kabut Asap Berulang’**

News

Oleh Ayat S Karokaro 4 Oktober 2019

Aksi Desak Tangani Kebakaran Hutan dan Kabut Berulang

Ratusan mahasiswa dan seniman Kota Medan, Sumatera Utara, menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sumut, di Medan, di penghujung September lalu. Mereka mendesak pemerintah segera menangani asap kebakaran hutan dan lahan berulang di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan.

Di Sumatera Utara, selain asap kiriman, kebakaran gambut dan lahan perkebunan sawit juga terjadi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Utara (BPBD Sumut) dan BPBD Asahan, kebakaran gambut terjadi di Desa Pembangunan, Sri Kepayang, Asahan sekitar 30 hektar. Akibatnya, kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah hingga ke Kota Tanjung Balai dan Batubara.

Data Pemerintah Sumut, selain Asahan, asap karhutla juga terjadi di Kota Padang Sidempuan, Padang Lawas Utara (Paluta) dan Labuhan Batu Selatan (Labusel). Di Labusel, pemerintah terpaksa meliburkan sekolah pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan SD.

“Inilah yang membuat kami khawatir. Asap kebakaran hutan jelas mengganggu kesehatan manusia. Kami turun ke jalan mendesak pemerintah tak hanya pencitraan. Segera tangani serius,” kata Muhammad Fahrizal Tarigan, penanggung jawab aksi, kepada *Mongabay*.

Berdasarkan data Pusat Penanggulangan Krisis (PPK), Kementerian Kesehatan, rekapitulasi data penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) 2019 di beberapa provinsi, antara lain, Riau pada periode Februari-September 268.591 jiwa, Jambi periode Juli-Agustus ada 63.554 korban.

Di Sumatera Selatan, terpapar ISPA periode Maret- September ada 291.807 orang. Di Kalimantan Barat, Februari-September, 163.662 orang, Kalimantan Tengah Mei-September 36.419 jiwa dan Kalimantan Selatan Juni- Agustus ada 60.993 orang.

Kalau melihat data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sampai 21 September 2019, pantauan titik api kategori sedang dan tinggi hingga sore hari 2.288 titik untuk seluruh Indonesia.

Menurut Tarigan, kondisi enam provinsi berasap dengan kualitas udara berdasar konsentrasi PM10 adalah Riau 314 (berbahaya), Jambi 238 (sangat tak sehat). Lalu, Sumatera Selatan 155 (tak sehat), Kalimantan Barat 324 (berbahaya), Kalimantan Tengah 409 (berbahaya) dan Kalimantan Selatan 22 (baik).

“Kalau dilihat data itu, perhatikan provinsi tetangga kita, yaitu Riau, kebakaran hutan cukup masif. Kita di Sumut terkena. Kami desak, pemerintah bertindak cepat menangani masalah ini. Jangan cuma pembakar yang ditangkap, korporasi juga,” katanya.

Dalam aksi penolak asap dan kebakaran hutan ini, para seniman Kota Medan dan mahasiswa menggelar aksi teatrikal, pembacaan puisi, akustik musik, dan pembagian masker kepada pengguna jalan.

Ada yang menarik dalam aksi menolak asap dan pembakaran hutan ini. Dua seniman dan mahasiswa menggunakan kostum orangutan dan harimau Sumatera.

“Ini bentuk keprihatinan kita atas pembakaran hutan juga rumah satwa liar dilindungi seperti harimau Sumatera dan orangutan.”

“Kami mendesak pemerintah mencabut izin perusahaan yang menyalahi aturan.”

Melihat kesehatan masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota di Sumut mulai terganggu kabut asap karhutla, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, bersama Pangdam I/BB, Kapolda Sumut, bupati/walikota kabupaten kota, dan pengusaha perkebunan sawit, menggelar rapat terbatas.

Di hadapan para pengusaha perkebunan sawit, menyatakan, tengah mendata serta mengumpulkan temuan lapangan. Kalau nanti terbukti ada perusahaan perkebunan sawit sengaja membakar lahan, akan langsung mencabut izin mereka.

“Jadi kalau saya bilang, bukan api saja yang dipadamkan. Pembakardan yang menyuruh membakar juga wajib di padamkan,” katanya.

Pemerintah Sumut juga sudah membagikan hampir 500.000 masker. Seluruh puskesmas dan Dinas Kesehatan juga diminta siaga 24 jam penuh. Kalau ada warga terserang sesak napas segera tangani.

“Sumut siaga kebakaran hutan. Selain dibantu aparat kepolisian kita juga dibantu pasukan TNI dari jajaran Kodam I Bukit Barisan,” kata Edy.

### **Hujan, kualitas udara membaik**

Pantauan BNPB berdasarkan citra satelit Modis-catalog Lapan pada Senin (30/9/19), menunjukkan kualitas udara membaik seiring hujan turun, titik api (*hotspot*) berkurang di Sumatera dan Kalimantan.

Agus Wibowo, Humas BNPB dalam rilis Selasa (1/10/19) mengatakan, pantauan titik panas cenderung turun, seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Data 30 September, mencatat titik panas berjumlah 673, tertinggi di Kalimantan Selatan dengan 141 titik, Kalimantan Tengah 63, Sumatera Selatan 63 dan Jambi 15. Riau dan Kalimantan Barat, tidak terdeteksi ada titik api.

Luasan hutan dan lahan terbakar selama 2019, sekitar 328.724 hektar.

“Kecenderungan titik panas turun semoga terus dipertahankan hingga masyarakat dapat menghirup udara sehat dan beraktivitas di luar rumah,” kata Agus.

<https://www.mongabay.co.id/2019/10/04/aksi-desak-tangani-kebakaran-hutan-dan-kabut-asap-berulang/>

Pemberitaan pada Mongabay dengan judul ‘Aksi Desak Tangani Kebakaran Hutan dan Kabut Asap Berulang’ yang ditulis oleh Ayat S Karoko ini diambil dari sudut pandang masyarakat. Hal ini menjadi menarik karena mahasiswa dan seniman tidak tahan dengan

kebakaran yang terus terjadi secara berulang, terutama di Sumatera dan Kalimantan.

Artikel ini menegaskan bahwa karakteristik yang disebutkan oleh Atton yaitu berita yang disampaikan mendalam pada kehidupan masyarakat. Artikel ini juga menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat yang terkena efek dari kebakaran hutan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan suaranya.

Ayat mengutip hasil dari wawancara yang menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menangani kebakaran ini, namun jangan lupakan oknum dan sebab akibat terjadinya kebakaran, agar hal serupa tidak terjadi lagi.

Kemudian pemberitaan berlanjut pada aksi mahasiswa dan seniman yang menggelar unjuk rasa dengan aksi teatrikal, pembacaan puisi, akustik musik, dan membagikan masker kepada masyarakat. Sudut pemberitaan ini diambil sebagai bentuk bahwa masyarakat ingin melestarikan lingkungan dengan demo yang tidak merusak lingkungan. Bahkan para pengunjuk rasa juga ada yang mengenakan kostum orang utan dan harimau, sebagai bentuk keprihatinan warga terhadap satwa yang terkena dampak karhutla.

Ayat juga menerangkan bahwa pada 30 November 2019 kualitas udara mulai membaik akibat turunnya hujan. Pantauan titik padas di Riau, Jambi, Sumatera, dan Kalimantan mulai turun. Jika penurunan titik panas di kawasan tersebut terus terjadi, maka

masyarakat dapat menghirup udara sehat dan beraktivitas di luar rumah.

#### **4.1.1.5 Pemberitaan pada Mongabay yang berjudul ‘Soal Kebakaran Hutan: Kasasi Pemerintah Ditolak, Organisasi Lingkungan Desak Segera Eksekusi’**

News

Oleh Indra Nugraha 22 Juli 2019

Soal Kebakaran Hutan: Kasasi Pemerintah Ditolak, Organisasi Lingkungan Desak Segera Eksekusi

“Tuntutan kita minta sebenarnya amanat Undang-undang. Seharusnya, tak ada lagi bahasa presiden PK (peninjauan kembali-red). Kenapa? Karena ini harus tetap dieksekusi. Ada atau tidak ada gugatan hukum warga, pemerintah harus penuni. Ini mandat UU, harus tetap eksekusi,” kata Dimas Novian Hartono, Direktur Eksekutif Walhi Kalteng.

Dimas merespon putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Presiden Joko Widodo dan para menteri terkait gugatan peristiwa kebakaran hutan dan lahan pada 2015 di Kalimantan Tengah. Putusan perkara dengan Nomor Register 3555 tahun 2018 ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Dia menekankan, pemerintah harus menjalankan mandat UU, antara lain, hal-hal yang warga Kalteng, ajukan dalam gugatan ke pengadilan.

Cerita soal gugatan warga (*citizen law suit*) ini bermula dari peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kalteng pada 2015. Beberapa warga, antara lain Arie Rompas, Kartika, Fathurrohman, Afandi, Mariaty dan almarhum Nordin (kala itu Direktur Eksekutif Save Our Borneo), mengajukan gugatan pada 16 Agustus 2016.

Adapun pihak tergugat, seperti, Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Kesehatan, Gubernur dan DPRD Kalteng.

Tuntutan warga ini, antara lain, agar pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, macam, peraturan mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan baku mutu lingkungan.

Lalu, peraturan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup berkaitan dengan karhutla, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan analisis risiko lingkungan hidup. Juga, tata cara penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maupun tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup. Selain itu, para penggugat meminta pemerintah meminta maaf kepada masyarakat Kalteng di media cetak.

Pada 22 Maret 2017, Pengadilan Negeri Palangkaraya, dalam putusan Nomor 118/2016, mengabulkan gugatan warga sebagian. Hal yang tak dikabulkan ialah desakan agar pemerintah meminta maaf terbuka. Yang lain, dikabulkan.

Atas putusan itu, pemerintah sebagai tergugat mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Kalteng pada September 2017, dengan Nomor 36/2017, membatalkan banding para tergugat.

Masih tak terima putusan Pengadilan Tinggi Kalteng, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Lagi-lagi, upaya kasasi ini akhirnya ditolak pada Selasa (16/7/19) dengan alasan, kasasi yang diajukan pemohon tak dapat dibenarkan.

“Kami apresiasi putusan itu. Karena apa yang disampaikan Mahkamah Agung bahwa memang itu gugatan kita layak dimenangkan. Kasasi yang diajukan pemerintah layak ditolak,” kata Arie Rompas, penggugat, kala itu Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, kini di Greenpeace Indonesia, saat dihubungi *Mongabay*, Sabtu (20/7/19).

Putusan Mahkamah Agung, menunjukkan upaya-upaya hukum para penggugat sudah memenuhi rasa kepastian untuk tak terjadi lagi karhutla terutama di Kalteng.

“Kami berharap, putusan itu segera eksekusi. *Kan* sekarang ini kebakaran hutan dan lahan masih terjadi, belum ada upaya-upaya optimal. Putusan ini seharusnya bisa memperkuat upaya-upaya pemerintah untuk perbaikan-perbaikan dalam konteks penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” katanya.

Soal langkah Pengajuan Kembali (PK) pemerintah, kata Rio, sapaan akrabnya, merupakan hak mereka. “Seharusnya, kalau mereka fokus pada upaya-upaya untuk eksekusi putusan MA ini, itu akan

memberikan dampak lebih baik daripada coba upaya hukum lain, misal, PK,” katanya, seraya bilang, putusan MA sudah memperjelas kalau judisfaksi di pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. “Kalau PK, apalagi yang mau ditunjukkan dengan bukti-bukti barunya?”

Yang dituntut masyarakat, kata Rio, sebenarnya tanpa ada gugatan hukum juga seharusnya sudah dilakukan pemerintah. Tak ada tuntutan materi kepada pemerintah, hanya hal-hal yang sebenarnya sudah wajib sesuai Undang-undang.

“Substansinya, kami mau menggunakan pengadilan untuk meminta mereka menjalankan fungsi terkait Undang-undang yang ada.”

Senada dengan Rio, Safrudin Mahendra, Direktur Eksekutif Save Our Borneo (SOB) mengatakan, putusan Mahkamah Agung ini patut disyukuri dan merupakan kemenangan masyarakat Kalteng.

Seharusnya, pemerintah tak perlu lagi ada langkah-langkah hukum lain seperti Peninjauan Kembali.

“Karena *toh*, semua poin-poin dalam gugatan itu bukan hal yang merugikan mereka. Ini sebenarnya untuk memperbaiki tata kelola kehutanan.”

Dia menyayangkan, kalau pemerintah ajukan PK. Seharusnya, pemerintah memang memperbaiki tata kelola kehutanan dan penanggulangan bencana kebakaran, bersama-sama masyarakat, bukan sebaliknya.

Tuntutan masyarakat itu, kata Udin, tak aneh-aneh. Hanya meminta penyusunan peraturan-peraturan yang seharusnya memang dikerjakan pemerintah. “Tidak ada merugikan pemerintah. Justru, seandainya tuntutan dipenuhi pemerintah, nama baik mereka akan lebih baik di mata masyarakat.”

Kinerja pemerintah dalam penanggulangan kebakaran terutama di Kalteng, kata Udin, melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG). Kalau melihat permasalahan kebakaran 2015, paling banyak terbakar memang di lahan gambut.

Meski begitu, katanya, upaya-upaya perbaikan dan restorasi gambut BRG, masih masih setengah-setengah alias belum optimal.

“BRG belum bisa mengidentifikasi lokasi-lokasi yang terjadi penurunan kualitas lingkungan. Sangat rentan bencana kebakaran. Masih banyak lokasi-lokasi belum tersentuh upaya restorasi mereka.

Ini dibuktikan setiap tahun, terus terjadi kebakaran. Walaupun memang intensitas tak sebesar 2015,” katanya.

Selama 2019, kata Udin, Kalteng, sudah banyak titik api dan lahan terbakar mencapai 400 hektar. Sebagian besar di lahan kelola masyarakat, ada juga di sekitar area perusahaan sawit.

“Juli ini paling banyak di Palangkaraya dan Kotawaringin Timur. Kebanyakan di lahan gambut. Ini menunjukkan langkah belum optimal, karena masih banyak kebakaran,” katanya.

Tim pemadam api pun, katanya, kesulitan akses air walau sudah ada pembangunan sumur bor. Dia bilang, belum semua wilayah kritis teridentifikasi BRG. “Seharusnya intervensi oleh BRG. Memang tak intervensi. Pembuatan sekat kanal, sumur bor tidak dilakukan di lokasi-lokasi itu.”

### **Era Jokowi mulai perbaikan**

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam keterangan pers yang diterima *Mongabay* mengatakan, gugatan dilandasi kejadian karhutla 2015. Kejadian yang menghanguskan sekitar 2,6 juta hektar lahan dan hutan itu, terjadi kurang dari setahun Presiden Jokowi menjabat. Karhutla sebelumnya, sudah rutin masif selama hampir 20 tahun.

“Waktu baru menjabat, presiden dan kita semua sebenarnya sudah mengikuti gerak titik api dengan turun ke lapangan. Sayangnya, tak tertolong, titik api sudah membesar pada 2015,” katanya.

“Karena baru menjabat, tentu kami semua harus pelajari penyebabnya, ada apa *nih* begini? Kenapa? Di mana letak salahnya? Ternyata banyak yang salah-salah dari yang dulu. Pak Jokowi justru membenahi yang salah-salah itu,” kata Siti.

Dia bilang, karhutla ternyata persoalan berlapis di tingkat tapak. Mulai dari regulasi lemah, sampai oknum masyarakat hingga korporasi yang sengaja membakar atau lalai menjaga lahan mereka.

“Ada konsesi buka lahan pakai kontraktor dengan menyuruh rakyat untuk bakar, setelah itu mereka lari. Itu memang terjadi dan terus terjadi berulang.”

Kalau dulu, kata Siti, penegakan hukum lemah sekali, tata kelola lahan kacau, ada korporasi besar tetapi tak punya peralatan pemadaman, penetapan status lambat karena kepemimpinan di daerah lemah. Juga,



alih fungsi lahan bermasalah, izin tak sesuai peruntukan, dan banyak sekali masalah lain.

“Jadi, saat kejadian karhutla 2015, memang luar biasa kita menabung ilmu masalah. Instruksi Presiden Jokowi setelah itu jelas, perbaiki, benahi, jangan ada karhutla lagi. Apalagi, sampai terjadi asap lintas batas ke negara tetangga,” katanya.

Siti bilang, dalam waktu relatif singkat pasca karhutla 2015, di bawah instruksi Presiden Jokowi, keluar berbagai kebijakan dan langkah koreksi besar-besaran untuk pengendalian karhutla. Dia sebutkan, keluar Instruksi Presiden Nomor 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla, Inpres 8/2018 tentang Moratorium Izin Sawit, PP 57/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, hingga pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Di KLHK, keluar kebijakan krusial seperti Peraturan Menteri LHK Nomor 32/2016 tentang Pengendalian Karhutla, membenahi tata kelola gambut dengan baik dan berkelanjutan melalui pengawasan izin, penanganan dini melalui status kesiagaan dan darurat karhutla, dan berbagai kebijakan teknis lain.

“Jadi, paradigma menangani karhutla berubah total. *Kalo* dulu, api sudah besar saja belum tentu pemda *ngapa-ngapain*. Pemerintah pusat juga tidak bisa bantu karena harus menunggu status dulu. Harus menunggu api besar dulu baru *dipadamin*, itu yang menyebabkan bencana berulang-ulang. Kalau sekarang, kita antisipasi dari hulu hingga ke hilir,” katanya.

Siti bilang, terjadi perubahan paradigma dari penanggulangan ke pengendalian. “Kebijakan melibatkan banyak stakeholder, termasuk para pemilik izin konsesi. Semua berubah total di bawah pengawasan penuh pemerintah.”

Dalam kurun 2015-2018, sekitar 550 kasus dibawa ke pengadilan baik melalui penegakan hukum pidana maupun perdata. Sebanyak, 500 perusahaan kena sanksi administratif terkait pelanggaran, bahkan ada yang izin dicabut. Untuk pengamanan kawasan hutan dan sumberdaya kehutanan, katanya, lebih dari 713 operasi pengamanan dilakukan melibatkan KLHK, kepolisian dan TNI.

“Kasus karhutla yang berhasil dimenangkan mencapai Rp18 triliun, menjadi nilai terbesar sepanjang sejarah tegaknya hukum lingkungan pasca karhutla 2015.”

Dia bilang, penegakan hukum sangat tidak mudah. “Kita sampai berkali-kali digugat balik, saksi ahli juga sampai digugat, tapi kita tidak gentar. Penegakan hukum ini penting untuk memberikan efek jera, agar tak ada lagi yang berani main-main dengan aturan pencegahan karhutla berulang,” kata Siti.

<https://www.mongabay.co.id/2019/07/22/soal-kebakaran-hutan-kasasi-pemerintah-ditolak-organisasi-lingkungan-desak-segera-eksekusi/>

Berita dengan judul ‘Soal Kebakaran Hutan: Kasasi Pemerintah Ditolak, Organisasi Lingkungan Desak Segera Eksekusi’ ini memberikan informasi tentang kasasi pemerintah ditolak dan gugatan warga. Artikel ini menjalankan visi dan misi dari Mongabay.co.id sebagai fungsi pengingat dan kritik.

Indra menjelaskan bahwa kasasi pemerintah Indonesia dari Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri, mengenai kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah pada tahun 2015 ditolak Mahkamah Agung.

Setelah peristiwa itu terjadi kemudian muncullah gugatan warga, tuntutan warga ini berisi agar pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana UU Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, peraturan mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, tata cara penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan baku mutu lingkungan.

Perspektif berita ini diambil dari sisi warga yang merasa kecewa dengan pemerintahan yang tidak dapat menjalankan aturan dan

putusan-putusan yang sudah dibuat. Gugatan tersebut terus berlangsung hingga pada tahun 2019, karena kebakaran terus terjadi.

Pada bagian terakhir Indra mengakhiri dengan perbaikan yang dilakukan oleh Joko Widodo pada saat baru menjabat. Siti Nurbaya menjelaskan bahwa sebelum Presiden Joko Widodo menjabat penegakan hukum lemah sekali, korporasi besar tidak memiliki peralatan pemadaman, penetapan status lamban, izin tak sesuai peruntukan, dan masih banyak masalah lainnya.

#### **4.1.1.6 Pemberitaan pada Mongabay yang berjudul ‘Kebakaran**

*Berulang di Perusahaan Sawit dan Bubur Kertas Masih*

*Minim Sanksi’*

News

Oleh Lusia Arumingtyas 28 September 2019

Kebakaran Berulang di Perusahaan Sawit dan Bubur Kertas Masih Minim Sanksi

Indonesia alami kebakaran hutan dan lahan parah pada 2015. Empat tahun setelah itu, karhutla parah berulang termasuk di konsesi perusahaan baik sawit maupun hutan tanaman industri. Kini Sejak beberapa pekan lalu, ratusan ribu warga di Kalimantan, Sumatera, bahkan sebagian Sulawesi, terpaksa menghirup napas tak sehat bahkan berbahaya. Greenpeace Indonesia menganalisa ada konsesi, baik perkebunan sawit maupun perkebunan bubur kertas dengan lahan terbakar pada 2015-2018, masih terindikasi titik api dengan level tinggi tahun ini.

Berdasarkan data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Greenpeace menganalisis, pemetaan sejumlah perusahaan sawit maupun bubur kertas yang karhutla periode 2015-2018, lolos dari sanksi serius pemerintah.

“Hampir tak ada perusahaan sawit dan bubur kertas yang konsesi terbakar dihukum tegas dengan diberikan sanksi pemerintah. Meski, terjadi kebakaran berulang di konsesi sama,” kata Kiki Taufik, Juru Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, di Jakarta, pekan lalu.

Analisa pemetaan Greenpeace memperlihatkan, ada 10 perusahaan sawit yang memiliki lahan terbakar terbesar karhutla 2015-2018, belum mendapatkan sanksi serius. Bahkan, belum ada pencabutan satupun izin konsesi di lahan itu.

”Hal ini menandakan pemerintah tak serius penegakan hukum, padahal ini sering jadi alasan utama mengapa karhutla terjadi setiap tahun,” katanya.

Perusahaan-perusahaan itu, katanya, tak mendapatkan sanksi, administratif maupun perdata. Tahun ini, tercatat titik api muncul lagi di konsesi sama.

Dia contohkan, PT Globalindo Agung Lestari, Kalimantan Tengah, titik api tertinggi tahun ini sampai 297 titik. Perusahaan yang tergabung dalam Grup Genting ini merupakan kelompok dalam 10 konsesi terbesar terbakar pada 2015-2018, luas sampai 5.000 hektar.

”Grup Genting juga memiliki titik api tertinggi tahun ini, 434 titik dibandingkan grup perusahaan sawit dengan area kebakaran terbesar kurun waktu 2015-2018,” katanya.

Berdasarkan surat jawaban kepada Greenpeace, Genting Group melalui Genting Plantations Berhad berkomitmen, membuka lahan tanpa membakar dengan penerapan kebijakan tanpa bakar. Upaya ini mereka perkuat sebagai komitmen anggota RSPO sejak 2006.

Grup ini menampik, berdasarkan peta KLHK di wilayah konsesi mereka tak ada area terbakar signifikan. “Area terbakar umumnya di luar konsesi. Ini sebanding dengan data internal 2016-2018, untuk PT Globalindo Agung Lestari selama tiga tahun ada area tanam terbakar 6,8 hektar. Di area terbakar di milik masyarakat 203 hektar,” bunyi pernyataan perusahaan.

Dari investigasi, penyebab kebakaran di areal tanam tak diketahui atau berasal dari areal masyarakat yang membuka lahan untuk tanaman pangan.

Ada juga PT Dendymarker Indah Lestari (DIL) di Sumatra Selatan, titik api tertinggi kedua tahun ini, ada 182 titik api. Total luas kebakaran lahan pada 2015-2018 mencapai 5.400 hektar.

Sander Van Den Ende, Direktur Regional Lingkungan dan Konservasi SIPEF, perusahaan yang mengakuisisi DIL pada 2017 mengatakan, dalam catatan uji tuntas perusahaan ada 4.817 hektar terbakar pada 2015 di konsesi mereka.

”Ini subyek yang mendapatkan sanksi dari polisi dan diselesaikan oleh pemilik sebelumnya bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Ende.

Sejak akuisisi 2017, SIPEF terus pemantauan dan tak pernah gunakan api sebagai bagian dari operasi pembukaan lahan. Pada 2019 banyak titik api, dia bilang akan lakukan pengawasan dan cek oleh staf lapangan. Kalau menemukan api, mereka akan memadamkan api dan membuat laporan polisi.

Ada juga PT Monrad Intan Barakat (MIB) di Kalimantan Selatan, ditemukan 103 titik api. Luas terbakar sejak 2015-2018 mencapai 8.100 hektar.

Dari 12 grup perusahaan sawit yang terbukti karhutla 2015-2018, hanya dua mendapatkan sanksi. ”Hanya dua dari 12 grup perusahaan dengan luas terbakar terbesar konsesi 2015-2018 yang dijatuhi sanksi perdata dan administrasi pemerintah,” kata Kiki.

Dia sebutkan, perusahaan yang kena sanksi hanya kebun HTI Korindo, dan PT Korintiga Hutani, namun bukan atas kebakaran dalam konsesi sawit mereka.

Berdasarkan grup perusahaan sawit dengan area kebakaran terbesar pada 2015-2018, yakni, Grup Sungai Budi (Tunas Baru Lampung) 16.500 hektar, Bakrie 16.500 hektar, Best Agro Plantation 13.700 hektar, Lippo 13.000 hektar, dan Korindo 11.500 hektar.

Korindo mengatakan, setelah analisis terhadap peta kebakaran hutan, sejak 2016-2018, tak terjadi kebakaran di lahan mereka.

”Sejak awal Januari 2019 sampai dengan saat ini juga tak pernah terjadi kebakaran lahan di perkebunan sawit Korindo di Papua,” tulis pernyataan Korindo.

Perusahaan sawit di bawah naungan Grup Korindo, PT Dongin Prabhawa, seluas 5.200 hektar terbakar dalam kurun waktu 2015-2018. Bahkan, sejak awal tahun, tak ada kebakaran.

”Korindo Group menerapkan dan melaksanakan program pengendalian dan penanggulangan kebakaran di perkebunan perusahaan secara konsisten dan penuh tanggung jawab.”

Kiki mengatakan, tak ada satupun izin perusahaan sawit dicabut oleh pemerintah terkait karhutla 2015 hingga 2018, kecuali tiga perusahaan HTI, yakni PT Hutani Sola Lestari (Riau), PT Mega Alam Sentosa (Kalimantan Barat) dan PT Dyera Hutan Lestari (Jambi).

”Tiga perusahaan ini tak masuk peringkat 10 teratas *burnscar* terluas dari 2015-2018,” kata Rusmadia Maharudin, Jurukampanye Hutan Greenpeace.

### **3,4 juta hektar terbakar**

Dari analisis Greenpeace, luas kebakaran pada 2015-2018, mencapai 3.403.000 hektar. Pada 2015, lebih dari 2, 6 juta hektar lahan kebakaran. Greenpeace menyebut, sebagai salah satu bencana lingkungan hidup terbesar abad ke-21.

Dalam Undang-undang Indonesia, menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak kepada perusahaan sehubungan dengan kebakaran hutan, yang diatur dalam UU Kehutanan Nomor 41/1999 dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32/2009.

Jadi, perusahaan yang bergerak pada sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan, bertanggung jawab secara hukum atas setiap kebakaran di lahan mereka, terlepas sumber api dari mana.

Greenpeace Indonesia bersama Save Our Borneo dan berbagai elemen masyarakat membentangkan spanduk di Jembatan Kahayan, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu lalu (22/9/19). ”Pak Jokowi Padamkan Kebakaran Hutan, Jangan KPK” dan ”Pak Jokowi Tegakkan Hukum Untuk Cegah Karhutla.” Begitu bunyi spanduk itu.

### **Serius tegakkan hukum**

KLHK merasa telah tegakkan hukum serius dan timbulkan efek jera. ”Sejak 2015, penegakan hukum sangat serius oleh KLHK terkait karhutla baik melalui administratif, perdata dan pidana,” kata Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum, KLHK kepada *Mongabay*.

Dia bilang, Greenpeace perlu melihat dalam perspektif luas menilai penegakan hukum KLHK. ”Kami melihat penegakan hukum sejak 2015 mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan perusahaan. Memang perlu ditingkatkan terutama terkait penguatan efek jera dan perluasan penindakan,” katanya.

Pada 2015, KLHK memberikan sanksi kepada 64 perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan, baik paksaan perintah untuk memperbaiki, pembekuan maupun pencabutan izin.

“Penegakan hukum administratif kita lakukan sejak 2015. Kita juga gugatan perdata terhadap 17 korporasi yang lahan terbakar, sembilan sudah berkeputusan tetap, lima berproses di pengadilan dan tiga sedang masuk gugatan ke pengadilan, empat perusahaan dipidana oleh penyidik KLHK,” kata Roy, sapaan akrabnya.

Begitu juga karhutla tahun ini. KLHK, katanya, telah menyegel 62 area korporasi terbakar, delapan korporasi sudah jadi tersangka.

Dalam laman *Facebook* Roy, Sabtu (28/9/19), Dirjen Penegakan Hukum, KLHK penyegelan lokasi terbakar PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (RKK) di Muaro Jambi sekitar 1.200 hektar.

“Kami akan menindak tegas RKK karena terbakar lagi, baik melalui sanksi administratif, perdata dan pidana. Tahun 2015, di RKK terbakar seluas 591 hektar dan RKK diputuskan bersalah oleh Mahkamah Agung membayar ganti rugi dan biaya pemulihan Rp192 miliar.”

Ke depan, kata Roy, KLHK terus meningkatkan efek jera dengan penerapan pasal-pasal terkait pidana karhutla termasuk perampasan keuntungan dan pelibatan pemerintah daerah untuk memperluas cakupan wilayah kerja penegakan hukum karhutla.

### **Luas kebakaran seukuran Singapura**

Rusmadia Maharudin mengatakan, konsesi Sinar Mas atau Asia Pulp and Paper (APP) dalam 2015-2018, terbakar melebihi luas Singapura, yakni, PT Bumi Andalas Permai sekitar 81.000 hektar.

“Area kebakaran terbesar di seluruh dunia, konsesi ini hanya menerima sanksi perdata dan sanksi administrasi sangat ringan,” katanya.

Sanksi administrasi, antara lain, penanaman kembali di area terbakar alias hanya rehabilitasi. “Padahal terbakar seluas Singapura, namun tak ada kompensasi lain yang seharusnya mereka bayar.”

Luasan kebakaran terbesar dalam 2015-2018, Grup Sinar Mas (APP, pemasok dan afiliasi) total 257.900 hektar dengan 10 sanksi perdata dan administrasi, diikuti Perhutani (Inhutani) 89.800 hektar kena dua sanksi, Royal Golden Eagle (RGE)–April, RAPP, pemasok dan afiliasi– seluas 55.600 hektar dengan 12 sanksi.

Analisa Greenpeace, grup Sinar Mas/APP memiliki konsesi terbakar setiap tahun dalam 2015-2018, hingga kini tak menerima sanksi perdata atau administrasi serius. Bahkan, tahun ini, terditeksi 234 titik api sampai 16 September 2019 di PT Arara Abadi, Riau. Perkiraan terbakar perusahaan ini pada 2015-2018 seluas 11.500 hektar.

Di Grup April/RGE ada dua konsesi terbakar setiap tahun sampai 2019, yakni, PT Sumatera Riang Lestari (SRL), luas 14.700 hektar (2015-2018) dan PT Sumatera Silva Lestari (SSL), Riau, 11.600 hektar.

SRL mendapatkan sanksi izin dibekukan sementara pada 2016 dan paksaan pemerintah pada 2017. Sedangkan, SSL saksi paksaan pemerintah pada 2016. Titik api tertinggi berada di konsesi SRL mencapai 483 titik, sedangkan SSSL delapan titik api.

”Kasus pidana SRL sempat dihentikan penyidikan pada 2016. KLHK baru-baru ini menyegel sebagian dari lahan perusahaan itu,” katanya.

Dalam tanggapan perusahaan, menyebutkan, luasan kebakaran hasil *overlay* dengan KLHK sudah dilaporkan kepada pemerintah, berbeda yang disebutkan Greenpeace, luas terbakar Grup RAPP (435 hektar), SRL (756,8 hektar), dan SSL (112,5 hektar).

April mengatakan, sejak 1 Juli-20 September 2019, perusahaan mendeklarasikan periode darurat kebakaran di semua konsesi di Riau. “Deklarasi ini kunci dari upaya perusahaan memperketat penggunaan api oleh pihak ketiga di lahan yang berisiko dan mendukung komitmen kami bekerja sama dengan pemerintah, pemegang konsesi lain dan masyarakat selama musim kemarau.”

### **Tim independen**

Penegakan hukum kasus karhutla lemah, Kiki mendesak, pemerintah membentuk tim independen meninjau pengembangan dan proses penegakan hukum agar berjalan konsisten dan transparan.

Soal transparansi, KLHK juga harus merilis kepada publik semua rincian kasus baik perdata ataupun pidana kebakaran hutan. Keputusan Mahkamah Agung terhadap ATR/BPN pun mendesak dilakukan, seperti, membuka data hak guna usaha (HGU) untuk memudahkan publik atau masyarakat mengawasi perusahaan dalam pengelolaan konsesi.

“Pemerintah juga perlu segera menyita aset dan mencabut izin perusahaan yang belum membayar kompensasi atau tak mematuhi sanksi untuk menciptakan efek jera.”



Selain itu, perlu perlindungan total hutan dan lahan gambut. “Akhirnya segera semua perluasan atau ekspansi perkebunan ke hutan dan lahan gambut. Lindungi semua gambut tersisa dengan peraturan kuat.”

<https://www.mongabay.co.id/2019/09/28/kebakaran-berulang-di-perusahaan-sawit-dan-bubur-kertas-masih-minim-sanksi/>

Artikel dengan judul ‘Kebakaran Berulang di Perusahaan Sawit dan Bubur kertas Masih minim Sanksi’ ini merupakan artikel terakhir yang peneliti jadikan sebagai contoh artikel. Artikel ini menjalankan fungsinya sebagai pengawas bagi pemerintah, dengan mengingatkan bahwa sanksi yang diterapkan pada karhutla masih minim.

Sebagai fungsi kritik, artikel ini mengingatkan kepada masyarakat bahwa, masih banyak oknum-oknum yang belum mendapatkan sanksi, dan mudahnya akses perizinan untuk membakar lahan.

Greenpeace Indonesia menganalisis luas kebakaran yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2018 mencapai 3.403.000 hektar, dan pada tahun 2015 lebih dari 2,6 juta hektar lahan terbakar.

Hal ini menandakan bahwa pemerintah tidak serius dalam menegakan hukum, terhadap kasus karhutla yang terjadi setiap tahun. Angel berita ini diambil untuk memberikan kritik kepada pemerintah sekaligus menjadi *watchdog*.

Pada tahun 2015 KLHK telah memberikan sanksi kepada 64 perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan. Pada tahun 2019 KLHK telah menyegel 62 area korporasi terbakar.

Setelah sanksi dan penyegelan yang dilakukan sejak 2015 kemarin, kebakaran tetap terjadi. Konsensi Sinar Mas atau Asia Pulp and Paper (APP) dalam 2015-2018, kebakaran melebihi luas Singapura, yakni, PT Bumi Andalas Permai, sekitar 81.000 hektar.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Ridzki Rinanto Sigit (Head Operation)**

Ridzki Rinanto Sigit merupakan seseorang yang sudah bekerja selama 20 tahun dengan berfokus pada isu lingkungan, terutama kehutanan. Ia memiliki latar belakang pendidikan S1 Kehutanan di Institut Pertanian Bogor (IPB), S2 Magister Manajemen di Institut Pertanian Bogor (IPB), dan gelar doktor (S3) Ilmu Komunikasi di Universitas Sahid. Melalui hal ini peneliti ingin mengetahui mengapa isu lingkungan dianggap menarik. Ketika peneliti menanyakan, mengapa harus isu lingkungan? Ridzki mengatakan bahwa,

Isu lingkungan di Indonesia saat ini bagaikan dua mata koin, di sisi pertama Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan termasuk salah satu yang terbesar di dunia, di sisi lain kerusakan alam di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar juga di dunia, salah satunya adalah deforestasi dan kebakaran hutan, apalagi Indonesia memiliki komitmen dalam mengurangi emisi gas, efek rumah kaca, dll.

Dalam berita yang ditulis oleh Agus (2019) dengan judul “Makna Penting Hutan bagi Orang Rantetarima”, dijelaskan bahwa masyarakat di sana menggantungkan hidupnya pada kebaikan alam, mulai dari air, tanaman hutan, hingga aneka ragam pohon untuk kepentingan hidup. Tentu saja kerusakan hutan dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat, bahkan sesuai dengan perkataan Ridzki bahwa kebakaran hutan di Indonesia termasuk sebagai salah satu yang terbesar.

Hal inilah yang dapat dikatakan sebagai alasan mengapa Ridzki menempatkan isu lingkungan pada tempat khusus di hidupnya. Sebagai media alternatif, tentu saja Mongabay memiliki beberapa perbedaan dengan media *mainstream*. Selain perbedaan fokus isu yang cukup signifikan, cara Mongabay menentukan pemberitaan juga berbeda.

Ridzki mengatakan bahwa sebagai media online, Mongabay memiliki keunikan jika dibandingkan dengan media *mainstream*. *Gatekeeping* tidak hanya terletak pada bagian editorialnya saja tetapi juga sebenarnya dapat dilihat dari berbagai macam informasi dari Mongabay.org atau sebaliknya. Mongabay Indonesia juga memiliki sumber-sumber dengan tingkat validasi tinggi dalam pemberitaan lingkungan.

Mongabay Indonesia memiliki *virtual office* yang dikatakan cara kerjanya berbeda dengan media konvensional. Perencanaan berita

dilakukan dengan rapat redaksi secara virtual tanpa perlu bertemu secara langsung, hal ini dilakukan untuk efisiensi baik dalam hal waktu, tenaga, ataupun dari sisi ekonomi. Sebagai contoh saat sedang liputan mengenai COP25 yang sedang berjalan di Madrid, informasi dapat diperoleh dari Mongabay.org, dan disisi lain Mongabay Indonesia dapat melihat bagaimana dari sisi pemerintahan Indonesia, apakah ada yang terkait dan dibawa untuk COP25.

Dalam menentukan berita, Mongabay juga memiliki syarat-syarat tertentu, Ridzki mengatakan bahwa,

Agenda setting dibuat dengan syarat tertentu, yaitu yang berhubungan dengan pemahaman, pengetahuan, dan isu yang terkait dalam penentuan informasi tersebut. Misalnya kalau seseorang paham tentang isu kebakaran hutan, tentu dia tidak hanya melihat dari fenomenanya saja, tidak dari 5W + 1H saja, tapi juga dilihat dibalik fenomena tersebut ada hal apa yang mempengaruhi. Contohnya ada suatu lahan yang terbengkalai, kemudian dikonversi menjadi lahan lain. Lahan tersebut merupakan lahan gambut, ketika lahan tersebut dikeringkan, maka lahan gambut akan memicu terjadinya kebakaran. Yang perlu ditanyakan kembali penyebab terjadinya kebakaran berasal dari mana, apakah terbakar oleh karena sinar matahari, atau dibakar. Jika dibakar pertanyaan menjadi oleh siapa, motifnya apa, dan masih banyak yang perlu diketahui.

Mongabay memiliki beberapa keuntungan karena hanya memiliki satu fokus, yaitu isu tentang lingkungan. Hal ini menjadikan agenda setting dari Mongabay dapat memberikan dampak kepada audience untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak.

Sebagai media alternatif, tentu Mongabay memiliki perbedaan dengan media *mainstream*, Ridzki juga menjelaskan bahwa,

Hal ini berhubungan dengan bagaimana suatu isu dikemas, penyajian berita, dan audience, menentukan bagaimana berita itu terbentuk. Yang membuat Mongabay berbeda yaitu cara pandang Mongabay sendiri dalam menyoroti suatu masalah. Pada kenyataan tidak banyak perbedaan antara media alternatif dengan media konvensional, tergantung strategi dan taktik dari setiap media. Banyak media konvensional yang juga melakukan hal yang sama, seperti in-depth analisis dan investigasi, hanya mungkin isunya yang berbeda, dan tergantung pada masing-masing media akan dibawa kemana informasi tersebut nantinya.

Mongabay juga memiliki kekhususan, yaitu tidak hanya berhubungan dengan *straight news* saja, tetapi juga *indepth*. Mongabay memiliki kelebihan dalam mencari hal apa yang ada dibalik kebakaran hutan tersebut secara mendalam, Mongabay juga melihat apa saja komitmen Indonesia dalam hal lingkungan, kemudian hal ini dapat dijadikan faktor bagaimana informasi dapat dimuat. Hal ini yang menentukan bagaimana suatu isu ataupun informasi dikemas.

Setiap media pasti memiliki hambatan, Mongabay sebagai media alternatif pun punya hambatan. Jika dibandingkan dengan media *mainstream*, hambatan pada Mongabay cukup terlihat, Ridzki menjelaskan bahwa,

Tugas mongabay adalah membuat suatu berita yang dibuat memiliki keutuhan, ataupun lengkap. Jika dilihat pada media sekarang, banyak media yang hanya mengejar kecepatan, mengedepankan 'click', dll. Mongabay tidak dapat melakukan hal tersebut, seperti yang sudah dibilang sebelumnya, tugas mongabay adalah membuat suatu berita secara utuh dan lengkap. Yang dimaksud dengan lengkap adalah kita harus melihat dari perspektif suatu masalah, jika masalahnya yang dimaksud adalah lingkungan, maka pemikiran *Non Government Organization* (NGO) berbeda dengan pemikiran pemerintahan. Harapannya berita yang lengkap dapat

mencakup keseluruhan sudut pandang suatu masalah. Namun terkadang ada beberapa kasus khusus yang hanya memerlukan satu sudut pandang saja misalnya tentang kematian orang utan yang tidak memerlukan sudut pandang yang banyak.

Seperti pada berita yang ditulis oleh Arumingtyas (2019) dengan judul “Pemerintah Bahas Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan 2020”. Berita ini memiliki kelengkapan seperti yang dijelaskan oleh Ridzki. Arumingtyas memaparkan tentang pembahasan rapat koordinasi kementerian, prediksi BMKG sepanjang 2020, perkiraan iklim 2020 berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, yang diikuti dengan kewaspadaan, hingga kepada penegak hukum dalam menangani para pembakar hutan, sebagai bentuk pencegahan.

Selain dibutuhkan informasi yang sangat lengkap, hambatan yang dirasakan oleh Mongabay juga yang biasa dirasakan oleh media *mainstream*. Seperti masalah kebudayaan, mobil mogok, melewati jalanan terjal, berhubungan dengan alam, tidak mendapatkan sinyal, menunggu berhari-hari, dan lain-lain.

#### **4.2.2 Sapariah Saturi (Senior Editor)**

Sebagai orang yang pernah bekerja di media *mainstream* dan media alternatif, Sapariah mengatakan bahwa media *mainstream* dan media alternatif memiliki beberapa perbedaan, salah satu perbedaan yang membuat Sapariah lebih memilih Mongabay adalah isu lingkungan yang tidak dianggap “seksi” oleh media *mainstream*,

kebanyakan media *mainstream* hanya mengupas kulit luarnya saja dari masalah lingkungan

misalnya terjadi kebakaran hutan media *mainstream* hanya memberitakan korbannya berapa banyak, masyarakat menggunakan masker, kabut asap, dll, tapi tidak dijelaskan mengapa bisa terjadi, pencegahan, dsb.

Memang dari awal Sapariah sudah menempatkan isu lingkungan pada tempat khusus dihidupnya, sehingga isu ini mendapatkan prioritas lebih jika dibandingkan dengan isu lain pada media, hal tersebut merupakan salah satu faktor mengapa Sapariah menjadi editor Mongabay.

Sapariah mengatakan bahwa tujuan utama dari Mongabay adalah memberikan dampak yang lebih baik, memberikan pencegahan, menjadi pengawas bagi pemerintah, mengingatkan batasan-batasan yang ada, memberikan wejangan-wejangan berdasarkan pengalaman masa lalu, memberikan kritik dan solusi agar tidak terjadi lagi.

Proses perencanaan berita di Mongabay dibagi menjadi tiga yaitu jangka panjang, menengah, dan pendek. Sebagai senior editor Sapariah biasa membuat pemberitaan jangka panjang secara pribadi, untuk satu tahun ke depan. Biasanya perencanaan ini dibuat untuk beberapa sektor yaitu kehutanan, lahan, pemerintahan, pencemaran, perubahan iklim, dll. Ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi perencanaan pemberitaan di Mongabay, misalnya dilihat dari faktor pemerintahan implementasi perizinan kebun sawit pada tahun 2020,

maka akan ditulis pada perencanaan pemberitaan pada tahun 2020 akan ada implementasi perizinan kebun sawit, dan sudah jadi tugas Mongabay untuk mengawasi pemerintahan.

Biasanya Mongabay itu ada rapat tahunan, paling setahun sekali atau dua kali, ga tentu juga sih, tergantung ada berita apa atau ada kejadian menarik apa yang tiba-tiba terjadi. Nah pas rapat itu biasanya aku usulin nih perencanaan yang udah aku buat, begini begini begini, nanti kan ada yang setuju dan pasti ada juga yang dibuang, atau dipindahin waktunya misalnya, terus kan juga ada ide-ide dari temen-temen yang lain. Perencanaan pemberitaan dibuat hanya sebatas kertas saja, penentuan hasil berita akan dibentuk lagi setelah liputan berjalan, apakah akan masuk ke dalam ranah *straight news* atau *feature*. Waktu penyebaran informasi terkait perencanaan pemberitaan juga sewaktu-waktu dapat berubah, misalnya, terdapat isu yang lebih penting dan harus segera diunggah, maka skala prioritas yang memimpin proses penyebaran informasi.

Seperti yang dikatakan Ridzki, pemberitaan pada Mongabay harus memiliki kelengkapan, di dalam satu artikel perlu kaya akan narasumber. Narasumber yang dipilih juga disesuaikan dengan fokus pada isu yang ingin diselesaikan atau ingin dibenahi.

Sapariah menjelaskan tiga poin perbedaan antara Mongabay dengan media *mainstream*. Yang pertama dan paling jelas adalah Mongabay memiliki fokus isu pada lingkungan dan hutan, sedangkan media *mainstream* memiliki banyak fokus termasuk isu lingkungan.

Poin kedua, Mongabay menganggap bahwa isu lingkungan merupakan isu yang menarik dan penting, sehingga informasi tentang lingkungan hingga ke hal kecil pun dianggap "seksi". Media



*mainstream* tidak terlalu menganggap isu lingkungan sebagai isu yang menarik atau tidak mau membuat isu lingkungan sebagai isu yang menarik.

Poin ketiga media *mainstream* memiliki keterikatan secara tidak langsung dengan pemegang kepentingan atau pemodal, sehingga berita yang ditampilkan akan terbatas dengan aturan iklan dan pemegang kepentingan. Mongabay tidak memiliki keterikatan seperti itu, bahkan dapat dikatakan Mongabay memiliki kebebasan dalam membuat berita.

Non profit justru bagus karena pemilik media tidak memiliki orientasi bisnis, jadi tulisan yang dimuat bisa memiliki warna yang lebih bebas, dan tidak memiliki hambatan terkait iklan dan masalah ekonomi lainnya.

Setiap media memiliki kendala masing-masing, jika ditanyakan kendala pada Mongabay Sapariah mengatakan bahwa Kebanyakan kendala sama dengan media *mainstream*, adanya perbedaan cara menulis pada setiap jurnalis yang membuat editor harus menyesuaikan dengan susunan berita yang sudah direncanakan oleh editor. Data yang diambil oleh jurnalis terdapat kekurangan atau tidak sesuai dengan rancangan editor, maka dibutuhkan waktu tambahan untuk liputan kembali, terutama pada saat liputan lapangan.

Kendala berikutnya ada pada saat pengambilan data yang melibatkan perusahaan-perusahaan pemodal dan atau pemerintahan. Setiap kali liputan lapangan harus benar-benar diperhitungkan,

research, mengetahui kondisi lapangan, mengetahui pokok masalah, dll. Meskipun tidak memiliki kepentingan iklan, namun Mongabay tetap memiliki hambatan dalam masalah penyebaran informasi, beberapa kali perusahaan melakukan protes dan meminta untuk menurunkan berita, namun Mongabay tetap tegas dan tidak mau menurunkan berita, dengan kondisi berita yang ditampilkan benar apa adanya dan jujur.

Kalau udah tau salah sebagai perusahaan harusnya introspeksi diri, harusnya dibenahi masalahnya, bukan ditekan medianya.

Berikutnya kendala teknis yang wajar atau biasa dijumpai oleh jurnalis lain, masalah sinyal, sulitnya akses masuk, Mongabay juga terkadang mengalami kesulitan dalam berbahasa. Informasi mengenai lingkungan biasa diambil di daerah-daerah yang masih belum banyak terjangkau manusia dan penduduk setempatnya memiliki bahasa daerah masing-masing, sehingga sering kali jurnalis mengalami kesulitan dalam berkomunikasi.

### **4.2.3 Jurnalis Mongabay**

Sebagai Jurnalis di Mongabay, Lusia Arumingtyas mengatakan bahwa bekerja sebagai jurnalis di Mongabay memiliki keuntungan sendiri, jika media *mainstream* memiliki keterbatasan yang berhubungan dengan iklan dan masalah ekonomi, maka Mongabay tidak memiliki keterbatasan tersebut, bahkan dapat dikatakan bebas.

Lusia juga mengatakan bahwa hal ini mempengaruhi bagaimana kinerja seorang jurnalis ditentukan. Lusia juga pernah memiliki pengalaman bekerja pada media *mainstream* selama satu tahun, ia mengatakan bahwa kinerjanya tidak maksimal karena harus terburu-buru mengerjakan sebuah artikel, proses perencanaan berita dari sisi jurnalis pun terhambat dan lebih mementingkan waktu dibandingkan dengan pemecahan masalah pada berita.

Aku menulis dan menggali isu itu berdasarkan kepentingan masyarakat, maksudnya kepentingan publik yang memang harus aku suarakan terutama masyarakat-masyarakat kecil di daerah, dan aku kan sering ke lapangan juga, jadi kaya tau gimana sih rasanya hidup di tengah kumpulan sawit gitu misalnya, dan mau ga mau mereka harus berpindah. Karena Mongabay punya cukup banyak kontribusi di daerah-daerah, jadi dia bisa menyuarakan isu-isu di daerah, isu-isu yang mungkin gabisa ditulis sama media lain, Mongabay bisa kasih kebebasan buat wartawannya, buat nulis sepanjang apapun asalkan datanya lengkap dan yang penting ada verifikasi dan konfirmasi dari pemerintah.

Salah seorang Jurnalis bernama Aseanty Pahlevi juga mengatakan bahwa salah satu permasalahan dalam melakukan liputan karhutla adalah kurangnya keterbukaan dari pihak keamanan ataupun pemerintah. Seperti yang dijelaskan oleh Sapariah, pihak pemerintah atau keamanan menghindari terjadinya konflik antara media dengan pihak perusahaan dan bisa merugikan pihak perusahaan.

Kebanyakan kasus-kasus ini aparat penegak hukum cenderung aksesnya agak kurang terbuka, terhadap progres bagaimana mereka menangani harhutla.

Misalnya ada perusahaan di Kalimantan Barat ini, yang sejak tahun 2014 dinyatakan sebagai tersangka pelaku pembakaran lahan, tapi kemudian kasusnya juga ga lanjut-lanjut, sampai beberapa tahun, sampai sekarang masih P-19 setingkat Kejaksaan tinggi. Nah untuk mengetahui materi apa, kan P-19 itu kan berkas dikembalikan oleh penyidik Kejaksaan untuk dilengkapi oleh pihak kepolisian. Nah kita mau tau secara rinci apa yang jadi petunjuk pelaksanaan dari jaksa terhadap penyidik kepolisian, untuk melengkapi berkas perkaranya juga ga bisa karna itu *code of conduct* mereka ga boleh ada yang tau, jadi akses disitu juga susah diawasin.

### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **4.3.1 Mongabay sebagai Media Alternatif**

Sesuai dengan konsep yang digunakan pada penelitian ini, media alternatif yang diungkapkan oleh Chris Atton yaitu penyampaian berita yang radikal, jurnalis merujuk pada kehidupan sehari-hari, dan merupakan kebalikan dari media *mainstream*.

Mongabay menunjukkan adanya keserupaan pada karakteristik tersebut, penyampaian berita yang radikal dilakukan oleh Mongabay dengan isu yang berbeda dari media *mainstream*, yaitu memiliki fokus isu pada lingkungan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Sapariah Saturi sebagai Senior Editor, ia menyebutkan bahwa isu lingkungan dianggap ‘seksi’ oleh Mongabay, dan memiliki tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat yang apatis, memberikan teguran kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan karhutla, memberikan edukasi bagi mereka yang belum mengerti tentang bahaya lahan

gambut, dan memberi informasi tentang dampak dari kebakaran hutan dan lahan.

Merujuk pada poin yang kedua yaitu jurnalis media alternatif tertanam dalam gaya hidup masyarakat, sehingga berita yang diciptakan pun sesuai dan mendalam pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam wawancara yang peneliti lakukan bersama dengan jurnalis Mongabay, Lusia Arumingtyas, ia mengatakan bahwa tulisan yang ia buat berdasarkan kepentingan masyarakat, bukan karena tuntutan perusahaan media yang mengharuskan jurnalisnya membuat artikel. Lusia juga dapat merasakan bagaimana masyarakat kecil harus pergi dari tempat tinggalnya karena kebakaran dan lahan tersebut akan digunakan sebagai lahan sawit.

Pada poin ketiga dijelaskan bahwa media alternatif merupakan kebalikan dari media *mainstream*. Dalam wawancara yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan hasil bahwa Mongabay memiliki hanya satu fokus isu dan digali secara mendalam, sedangkan media *mainstream* memiliki banyak isu. Mongabay tidak memiliki ikatan dengan iklan ataupun pemegang kekuasaan selain pemerintah, sedangkan media *mainstream* kebalikannya. Sesuai dengan konsep media massa pada poin edukasi yang menjelaskan bahwa, media memiliki tanggung jawab untuk menyajikan tayangan tentang nilai-nilai. Mongabay memiliki kemampuan untuk mengontrol masyarakat dalam edukasi secara mendalam, hal ini dapat dibuktikan dari artikel

yang membahas informasi secara mendalam tentang lahan gambut, dampaknya, siapa saja pelaku pembakaran hutan, pencegahan, dll. Sedangkan media *mainstream* hanya memberikan informasi kulit luarnya saja, seperti berapa hektar kebakaran, sudah berapa lama, update terkini dari masyarakat setempat, dll, karena memang media *mainstream* tidak memiliki perhatian khusus pada isu lingkungan.

Atton juga menjelaskan bahwa media alternatif harus memiliki sifat yang bebas, karena tidak terkait kepada individu ataupun golongan tertentu, karena sifatnya yang *non-profit*. Hal ini menjadi relevan karena Mongabay merupakan media alternatif *non-profit* dan memiliki kebebasan yang lebih jika dibandingkan dengan media *mainstream*, sehingga berita yang disampaikan pun dapat lebih mendalam dan beragam. Bukan hanya dari sisi isi berita saja yang berbeda, namun juga dari sisi hambatan yang berbeda, karena kerap kali artikel Mongabay diminta untuk tidak dipublikasikan karena menyangkut pada kesalahan-kesalahan anggota tertentu.

#### **4.3.2 Pemberitaan Mongabay terkait isu karhutla**

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti peneliti, setiap media massa memiliki fungsinya masing-masing baik media alternatif, ataupun media *mainstream*. Dalam wawancara yang dilakukan Sapariah menjelaskan bahwa fungsi Mongabay secara garis besar adalah untuk memberikan dampak yang lebih baik, pencegahan, menjadi pengawas bagi pemerintah, mengingatkan batasan-batasan yang ada, memberikan wejangan berdasarkan pengalaman

masa lalu, memberikan kritik dan solusi agar tidak terjadi lagi. Fungsi dari Mongabay ini pun juga terdapat pada media *mainstream*.

Dalam perencanaan pemberitaan Sapariah juga menjelaskan bahwa perencanaan berita dibagi menjadi tiga bagian, yaitu jangka panjang, menengah, dan pendek. Berhubung Mongabay hanya memiliki fokus isu pada lingkungan, maka hal ini bisa saja dilakukan, berdasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Namun bagi media *mainstream* perencanaan berita lebih sulit dilakukan karena fokus isu yang terlalu luas. Chris Atton mengatakan bahwa media massa mempunyai kekuatan untuk mengatur masyarakat, Mongabay memiliki keuntungan karena khalayak yang membaca atau mendapatkan informasi dari Mongabay, merupakan khalayak yang memang memiliki ketertarikan dengan isu lingkungan dan hutan.

Ridzki R. Sigit sebagai Head Operation Mongabay juga menjelaskan bahwa perencanaan berita Mongabay dibuat dengan syarat tertentu yang berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, dan isu yang terkait dalam penentuan informasi. Hal ini juga dipengaruhi oleh jurnalis yang mengambil data, informasi yang disajikan tidak hanya berdasarkan 5W+1H, namun perlu juga dicari tahu mengenai apa yang ada dibalik fenomena tersebut. Pemberitaan Mongabay disebutkan tidak hanya *straight news*, tetapi juga *indepth reporting*.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan berita Mongabay, diantaranya:

- Tidak ada pelatihan khusus dalam menulis

Jurnalis kontributor yang terlibat dalam penulisan berita pada Mongabay merupakan orang-orang yang memang memiliki ketertarikan pada isu lingkungan dan memiliki kemauan untuk memberitakan kebenaran. Ridzki menyebutkan bahwa Mongabay memiliki sumber-sumber dengan tingkat validasi tinggi dalam pemberitaan lingkungan.

- Penulisan memiliki orientasi pada perubahan dan kritik

Artikel yang dibuat oleh Mongabay cenderung memiliki orientasi pada perubahan dan kritik. Seperti pemberitaan yang berjudul ‘Kebakaran Berulang di Perusahaan Sawit dan Bubur kertas Masih minim Sanksi’ judul yang dibuat sudah dapat mencerminkan bagaimana orientasi perubahan dan kritik tertuang. Perubahan yang diinginkan adalah agar kebakaran tidak terulang, dan kritiknya adalah sanksi harus lebih diperkuat lagi.

- Informasi yang diberikan lengkap

Sesuai dengan ungkapan Ridzki bahwa Mongabay memiliki tugas untuk membuat suatu berita secara utuh dan lengkap. Setiap sudut masalah diperhitungkan dalam pembuatan artikel. Contohnya seperti berita dengan judul ‘Pemerintah Bahas Antisipasi Kebakaran hutan dan Lahan 2020’, informasi yang tertuang dalam berita ini melibatkan kementerian, BMKG, KLHK, TNI, dll. Informasi tentang antisipasi kebakaran pun lengkap dengan prediksi cuaca mengenai El-Nino pada tahun 2020 yang dianalisis NOAA, NASA, dan Jamstec.

- Isu lingkungan yang dikaitkan dengan banyak topik



Sebagai media alternatif yang memiliki fokus pada lingkungan terutama hutan, dalam setiap artikelnya, Mongabay juga membahas topik lain yang dapat dikaitkan. Bersangkutan dengan poin sebelumnya, informasi yang disajikan haruslah memiliki kelengkapan, contohnya hubungan antara lahan dan ekonomi, hutan dengan satwa, hutan dan kebudayaan, kebakaran dan politik, dll.